

Siaran Pers

Undang Tokoh dan Masyarakat Dayak, Kementerian PPN/Bappenas Jaring Masukan Konstruktif untuk Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur bukan hanya sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun masyarakat, interaksi, peradaban, dan kebudayaan. Peran masyarakat Dayak sebagai etnis asli Kalimantan dan tuan rumah IKN, tentu sangat penting untuk mewujudkan pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Seminar Nasional "**Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur**" untuk menjaring masukan konstruktif dari masyarakat Dayak terkait pemindahan IKN. Bagi masyarakat Dayak, IKN akan meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesempatan memperoleh kedudukan strategis di pemerintahan. "Dengan pemindahan IKN, masyarakat Dayak dapat berbaur dan memperoleh kesempatan yang sama dalam memajukan Indonesia. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga akan meningkatkan kontribusi Kalimantan yang lebih besar terhadap NKRI, lebih dari sekadar urusan sumber daya alam seperti kayu, sawit, batu bara dan migas," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam seminar yang diselenggarakan di Gedung Bappenas, Kamis (17/10).

Menteri Bambang menjelaskan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur memerlukan persiapan yang matang karena Pulau Kalimantan ini sendiri memiliki berbagai keunikan, seperti satu-satunya pulau di dunia yang menjadi rumah bagi tiga negara sekaligus, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta menjadi salah satu awal mula peradaban di Indonesia dengan sejarah Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Keunikan tersebut membuat rencana pemindahan IKN ke Kalimantan memerlukan persiapan yang matang di segala bidang, salah satunya dari sisi adaptasi warga lokal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pendatang. "Kami memastikan IKN yang baru tidak akan ada klaster yang eksklusif berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan dan kelompok ekonomi tertentu," ujar Menteri Bambang.

Senada dengan Menteri Bambang, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas sekaligus Ketua Tim Komunikasi IKN Himawan Hariyoga mengatakan IKN baru akan menjadi tempat berbaurnya budaya Indonesia. Himawan menggarisbawahi pentingnya setiap pihak, tanpa terkecuali, untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, salah satunya dengan memastikan aspek sosial budaya terjaga dengan baik dan memastikan faktor-faktor potensi konflik memiliki rencana mitigasi yang siap untuk dilaksanakan. "Pertemuan tokoh masyarakat Dayak dengan pemerintah ini dikemas dalam seminar yang bersifat dialogis untuk berdiskusi tentang pemindahan IKN. Seminar nasional ini bertujuan untuk mendapatkan masukan konstruktif yang lebih komprehensif agar pelaksanaan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur berjalan dengan lancar dan suku bangsa Dayak mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya," ungkap Himawan.

Tokoh masyarakat Dayak sekaligus Anggota DPR RI Willy Midel Yoseph mengatakan, masyarakat Dayak terkenal sebagai masyarakat yang mampu dan mau berubah sesuai perkembangan kebudayaan. Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang menegaskan pembangunan IKN di Kalimantan, pulau yang menyumbang 27 miliar dolar AS atau sekitar Rp 350 miliar per tahun untuk APBN tersebut, harus benar-benar memperhatikan aspek lingkungan. Pasalnya, 70 persen dari kawasan jantung Kalimantan seluas 22 juta hektare berada di wilayah Indonesia, "*Heart of Borneo* sangat kaya akan keanekaragaman hayati, 50 persen jenis flora dan fauna dunia bisa ditemukan di sana. Selain itu, 14 dari 20 sungai besar di Kalimantan hulunya berada di wilayah *the Heart of Borneo*. Apabila sungai itu rusak, selesai Kalimantan," tandasnya.

Jakarta, 17 Oktober 2019

Parulian Silalahi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31934283; Faks.: (021) 31901154
e-mail: humas@bappenas.go.id